



## Radar Bali



Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Arman Syifa, Jumat (5/6) di ruang pertemuan BPK RI Perwakilan Bali, kawasan Renon Denpasar menyerahkan penghargaan opini WTP kepada Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra yang didampingi Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Wakil Ketua DPRD I Made Muliawan Arya, dan Kepala SKPD Pemkot Denpasar

Edisi : Sabtu, 6 Juni 2015

Hal : 22



# Denpasar Pertahankan WTP 3 Kali Berturut-turut

## Rai Mantra : Jadi Tantangan Mewujudkan Good Governance

Pemerintah Kota Denpasar dibawah kepemimpinan Walikota IB. Rai Dharmawijaya Mantra, dan Wakil Walikota IGN Jaya Negara berhasil mempertahankan prestasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali atas Keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang Tahun 2015 ini dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini atas hasil pengelolaan Keuangan Daerah ini sudah yang ketiga kalinya secara berturut turut sejak tahun 2013. LHP BPK diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Arman Syifa, Jumat (5/6) di ruang pertemuan BPK RI Perwakilan Bali, kawasan Renon Denpasar. Laporan ini diterima langsung Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Wakil Ketua DPRD I Made Muliawan Arya, dan Kepala SKPD Pemkot Denpasar.

"Dari hasil pemeriksaan keuangan Pemkot Denpasar

yang telah kami lakukan selama dua bulan dan Tahun ini kembali memberikan opini WTP," ujar Arman Syifa. Pada tahun sebelumnya menurut Arman Syifa pihaknya juga telah melakukan penilaian keuangan Pemkot Denpasar dengan perolehan opini WTP, dan Tahun ini Pemkot Denpasar kembali memperoleh opini WTP. Dari Opini ini kami telah menilai pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemkot Denpasar yang telah berjalan secara wajar dan sesuai peraturan perundang-undangan, meski masih harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Arman Syifa juga mengatakan dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan selama dua bulan di Pemkot Denpasar merupakan hasil dari prestasi dan kerja keras seluruh aparatur Pemkot Denpasar. Sehingga dari hasil ini nantinya dapat sebagai bahan masukan kepada DPRD Kota Denpasar dengan fungsi pengawasannya, serta dapat menjadi masukan perbaikan kualitas laporan keuangan dimasa yang akan datang.

Sementara Walikota Rai Mantra mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bali yang telah melakukan pemeriks

keuangan Pemkot Denpasar, yang tahun ini kembali memberikan opini WTP. Walikota Rai Mantra juga menyadari perolehan WTP ini menjadi tantangan yang sangat berat kedepan, dengan arahan dari BPK RI Perwakilan Bali dapat terus memberikan bimbingan untuk perbaikan kedepan yang harus ditindaklanjuti. Dengan slogan Good Governance sebagai selogan yang sangat berat untuk dicapai yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemerintahan saat ini, dengan tuntutan transparansi yang akuntable, yang sangat sulit dipenuhi tanpa didukung dengan kapasitas dan suport dari yang berwenang. "Dari opini ini kita harus bisa untuk menjadi yang lebih baik dengan pembenahan dan perbaikan sistem yang harus terus ditingkatkan," ujar Rai Mantra.

Ketua DPRD Kota Denpasar I Gst Ngurah Gede mengatakan DPRD yang memiliki tugas fungsi pokok dalam pengawasan di Pemkot Denpasar dengan hasil pemeriksaan ini dapat sebagai acuan untuk pembenahan diri. "Mudah-mudahan perolehan WTP ini dapat menjadi tindak lanjut pembenahan diri, dan akan terus melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan kedepan," ujarnya. (adv)

Edisi : \_\_\_\_\_

Hal : \_\_\_\_\_



## Radar Bali

# Men-PAN-RB Apresiasi Badung

## Percepatan Reformasi Birokrasi

**MENTERI** Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Prof. DR. Yuddy Chrisnandi, MM memberikan apresiasi atas semangat Pemkab Badung dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi. Hal tersebut disampaikan MenPAN RB saat mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung, Jumat (5/6) di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung.

Acara tersebut dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB Muhammad Yusuf Ateh, AK., M-BA, Kapolda Bali Irjen Pol Ronny F Sompie, Bupati Badung bersama Istri Ny. Ratna Gde Agung, Wabup. I Made Sudiana, DPRD Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Badung, Kepala BPKP Perwakilan



ISTIMEWA

MenPAN RB Yuddy Chrisnandi tandatangi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung bersama Bupati Badung A.A Gde Agung, Jumat (5/6) kemarin, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung.

Provinsi Bali, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Sekda Badung serta pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Badung. MenPAN RB Yuddy Chrisnandi mengatakan pencanangan ini merupakan komitmen Dari Pemkab Badung yang didukung oleh seluruh jajarannya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bi-

rokrasi bersih dan melayani. Dijelaskan bahwa Pemkab Badung merupakan Lembaga Pemerintah yang ke 262 dari

511 kabupaten/kota di Indonesia yang telah melakukan pencanangan zona integritas. Diantaranya Badung menjadi salah satu dari 11 kabupaten/kota se Indonesia yang meraih predikat B dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (Sinopik) tiga SKPD Badung masuk 99 top ranking.

Sementara Bupati Gde Agung menyampaikan bahwa Pemkab Badung dengan dukungan DPRD Badung telah berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Berbagai langkah kongkrit serta upaya-upaya perbaikan telah, sedang dan akan terus dilakukan, sehingga

pelaksanaan fungsi pemerintahan yang baik dapat diwujudkan di Kabupaten Badung.

"Terbangunnya budaya melayani serta kerja keras yang senantiasa didorong oleh budaya inovasi dan budaya prestasi dengan berorientasi pada hasil serta dapat dinikmati oleh masyarakat kabupaten badung adalah menjadi tujuan bersama kami. Oleh karenanya ketika BPK RI Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan piagam penghargaan atas LHP dengan opini WTP kemarin, kami tegaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian ini harus linier dan paralel dengan tingkat kesejahteraan masyarakat," jelasnya. (advertorial/san)

Edisi : Sabtu, 6 Juni 2015

Hal : 24



## Radar Bali

### HUKUM

#### Vonis Arnawa Jadi 2 Tahun

DENPASAR - Vonis super istimewa dirasakan oleh Mantan Kadis PU Karangasem Wayan Arnawa beberapa waktu silam. Dia sebagai terdakwa kasus pipanisasi dituntut 3,5 tahun, namun hakim pengadilan tipikor akhirnya memvonis 1,5 tahun. Dengan kondisi jauh dibawah dua per tiga, jaksa melakukan banding. Hasilnya hakim Pengadilan Tinggi (PT) menaikan hukuman bagi Arnawa, menjadi 2 tahun. Namun Jaksa sepertinya akan kasasi.

“Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar mengenai lamanya putusan,” ujar hakim PT dalam putusannya, yang sudah diterima oleh Jaksa di Kejati. Dikonfirmasikan ke JPU kasus ini Hari Sutopo membenarkan memang vonis terhadap terdakwa Arnawa naik. “Ya naik, dari 1,5 tahun jadi 2 tahun. Naik lagi 6 bulan,” ungkapnya.

Dia mengatakan atas keputusan Pengadilan Tinggi ini memberikan isyarat bahwa Jaksa akan kasasi ke MA. Dia mengatakan, karena tuntutan 3,5 tahun semestinya dua per tiga dari tuntutan sekitar 2 tahun 8 bulan baru bisa diterima. “Jadi kami seperti akan kasasi atas keputusan PT ini,” ungkapnya. “Namun kami masih ada waktu pikir-pikir,” imbuhnya. Seperti halnya berita sebelumnya, Hakim menyatakan vonis dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan yang meringkan, sopan dan belum pernah dihukum. (art/gup)

Edisi : Sabtu, 6 Juni 2015

Hal : 25